

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dengan Ibukota Semarang. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah mengalami perekonomian yang lumayan meningkat dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Dengan ini, sektor perhubungan dibentuk dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai pembangunan dari kebutuhan masyarakat dalam bentuk pengendalian sarana dan prasaran transportasi umum dan komunikasi. Pengendalian dan perencanaan merupakan salah satu alat atau indikator yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk pengembalian keputusan. Dalam rangkai perencanaan mewujudkan tata kelola pemerintahan maka menyelenggarakan manajemen pemerintahan dengan cara transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna dan KKN. Supaya aktifitas berjalan dengan lancar maka pengendalian seluruh aktifitas secara bijaksana, dengan pengendalian yang dilakukan melalui anggaran yang akan disusun oleh pemerintah.

Pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya perlu dilakukan. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan penerapan akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. Semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pemerintah maka akan semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan

pengendalian biaya yang baik akan memudahkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pemerintah sehingga tujuan DISHUBKOMINFO dapat tercapai. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban, Kepala Dinas dapat memberikan wewenang dan tanggungjawab ke tingkat pimpinan di bawahnya, hal ini dapat membuat kerja Kepala Dinas lebih efisien karena tidak perlu meninjau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan cara menyelenggarakan perencanaan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Dari sistem pencatatan ini akan dihasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana sub bagian keuangan memenuhi tanggungjawabnya atas biaya-biaya yang terjadi dalam unit Dinas. Dalam pengelolaan Dinas, anggaran merupakan bagian yang sangat penting. Anggaran dapat memberikan aspek motivasi bagi manajemen untuk mencapai tujuan Dinas. Anggaran sering dipakai untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat pertanggungjawaban.

Tujuan pengendalian pusat pertanggungjawaban biaya adalah agar manajemen membuat perencanaan untuk setiap pusat biaya yaitu dengan mengelompokkan setiap biaya menurut fungsi unit kerja tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelompokan fungsi unit kerja yaitu pada pencatatan dan pemisahan biaya bagi tiap-tiap bagian atau sub bagian dalam DISHUBKOMINFO. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pertanggungjawaban biaya pada masing-masing bagian kepada Kepala Bidang. Pengelompokan inilah yang disebut dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban karena setiap pimpinan yang ditugaskan pada pusat-pusat biaya harus bertanggungjawab atas biaya yang terjadi

pada masing-masing pusat biayanya. Biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya.

Agar manfaat akuntansi pertanggungjawaban tercapai harus disusun anggaran setiap tingkatan manajemen yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut menguraikan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan serta penyimpangannya. Selisih antara anggaran dan realisasinya tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat penilaian kinerja karyawan suatu DISHUBKOMINFO dan juga berfungsi sebagai motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan pertanggungjawaban harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Pada penelitian Mandak (2013) tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan Manado dengan hasil penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik. Tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian biaya adalah membandingkan antara anggaran biaya dengan realisasi biaya. Dinas Perhubungan Kota Manado perlu membagi kembali pusat pertanggungjawaban sesuai dengan struktur organisasi yang telah ada yang berguna mempermudah proses pengendalian biaya juga sebaiknya dilakukan pemisahan biaya-biaya yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

Pada penelitian Pasaribu (2013) tentang Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Penelitian kinerja Pusat Biaya pada PT. A.J Central Asia Raya Cabang Manado dengan hasil pusat biaya *Collection* atau penagihan dan pusat biaya General and Administration Expense. Pada akhir tahun, kepala bagian menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan bagiannya dan mempertanggungjawabkannya kepada direktur utama. Kemudian direktur utama menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan perusahaan.

Pada penelitian Aliu (2013) tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi dan Penilaian kinerja dengan hasil tenaga kerja langsung terjadi selisih lebih besar Rp 2.504.450 selisih ini merupakan anggaran yang tidak terpakai. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di perusahaan ini mampu bekerja secara efektif, sehingga realisasi biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan yang diharapkan. Dari adanya selisih dari anggaran yang digunakan maka membuktikan bahwa kinerja karyawan perusahaan tersebut baik.

Pada penelitian Tumbuan (2013) tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alata Penilaian Kinerja Pusat Biaya dengan hasil penyusunan anggaran di secara *bottom-up*, dimana tiap-tiap bagian/fungsi terlebih dahulu membuat anggaran untuk kemudian diajukan ke manajemen. Penilaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan anggaran yang telah disusun, penilaian kinerja dengan biaya penilaian kinerja belum efektif.

Pada penelitian Anik (2013) tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya dengan hasil penerapan akuntansi

pertanggungjawaban belum memadai, masih terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya penggolongan biaya dan pemberian kode rekening. Pengendalian biaya, khususnya biaya produksi sudah efisien, laporan pertanggungjawaban yang dibuat menunjukkan semua biaya produksi yang direalisasikan lebih kecil dari yang sudah dianggarkan.

Pada penelitian Rumengan (2013) tentang Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya di Hotel Quality Manado dengan hasil bahwa struktur organisasi secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang, tanggungjawab setiap tingkatan manajemen dengan baik merumuskan penjelasan fungsi-fungsi pokok tugas dan tanggung jawab unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian ulang terhadap akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendali biaya. Peneliti ini merupakan replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandak (2013), dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, mengevaluasi efisiensi pengendalian biaya, dan untuk mengetahui peran akuntansi pertanggungjawaban dengan tahun analisis yang berbeda. Objek dari penelitian yang berbeda dengan dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya pengendalian suatu biaya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, **“PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARANA**

SEBAGAI PENGENDALIA BIAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah Bagaimanakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui efisiensi pengendalian biaya untuk mengukur kinerja pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada DISHUBKOMINFO ini dengan harapan agar penelitian berguna bagi semua pihak, antara lain :

- a. Bagi DISHUBKOMINFO :
 1. Sebagai bahan masukan guna perbaikan atau saran kepada manajemen mengenai system akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh DISHUBKOMINFO.
 2. Agar DISHUBKOMINFO dapat lebih meningkatkan efisiensi pengendalian biaya.
- b. Bagi Penulis :
 1. Dapat dijadikan bahan perbandingan tentang konsep dan fungsi tentang akuntansi pertanggungjawaban.

c. Bagi Pembaca :

1. Dapat menambah wawasan mengenai konsep dan fungsi akuntansi pertanggungjawaban.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah mendorong dilakukannya penelitian ini. Selain itu di dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka

Bab ini berkaitan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu juga diuraikan penelitian terdahulu, dan kerangka pikir penelitian.

BAB III Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, prosedur penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis data serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.